

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan madrasah sebagai institusi pengajaran Islam berlangsung secara mandiri. Madrasah merupakan bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang cenderung mengabaikan nilai-nilai keagamaan.<sup>1</sup> Awalnya madrasah hanya berfokus pada pengajaran agama Islam, mirip dengan pendidikan di masjid dan pesantren. Akibatnya pelajaran sosial, politik, ekonomi, dan budaya kurang diperhatikan, hal ini dikarenakan pembatasan dari pihak kolonial untuk menghambat kemajuan umat Islam.<sup>2</sup> Setelah Indonesia merdeka, posisi madrasah mulai memperoleh pengakuan dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah mulai memberikan perhatian dan pembinaan terhadap madrasah serta pesantren, melihat pentingnya peran kedua lembaga ini dalam membentuk karakter dan akhlak bangsa. Perhatian tersebut juga menjadi wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat(2).<sup>3</sup>

Pada era Orde Baru, madrasah mulai memperoleh pengakuan pada sistem penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Pemerintah juga memberikan dukungan kepada madrasah melalui program modernisasi pasca diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

---

<sup>1</sup> Hasbullah, Kebijakan Pendidikan(Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 175.

<sup>2</sup> Siti Farikhah, Manajemen Lembaga Pendidikan, 1 ed.(Temanggung: Aswaja Pressindo, 2015), hal. 262.

<sup>3</sup> Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan, 3 ed.(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 175.

1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Presiden Republik Indonesia.<sup>4</sup> Program pemerintah tersebut mencakup pengembangan kurikulum, perbaikan manajemen, serta peningkatan sarana dan prasarana. Dukungan dan perhatian dari pemerintah mulai diberikan berupa dana dan fasilitas guna mendorong pengembangan madrasah secara lebih profesional.<sup>5</sup> Keberadaan madrasah belum diatur secara *eksplisit* dalam UUSPN. Sistem pengelolaan pendidikan terpusat, madrasah dikelola oleh Departemen Agama dan sekolah umum berada dalam pengelolaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>6</sup>

Pada era Reformasi, perhatian terhadap madrasah meningkat dengan upaya penyempurnaan Undang-undang nomor 2 tahun 1989 menjadi Undang-undang nomor 20 tahun 2003.<sup>7</sup> Program pemerintah terhadap pendidikan yang lebih terbuka memberi madrasah peluang untuk berkembang dalam cara pengelolaannya maupun dalam penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Lulusan madrasah juga semakin diakui dan setara dengan lulusan sekolah umum dalam melanjutkan pendidikan dan memasuki dunia kerja. Perubahan ini membantu madrasah beradaptasi dengan kebutuhan zaman dan menjadi bagian penting dalam mendukung sistem pendidikan nasional.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Fuad Jabali dan Jabali, *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*, 1 ed.(Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003), hal. 71.

<sup>5</sup> Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, 3 ed.(Jakarta: Kencana, 2016), hal. 334-337

<sup>6</sup> Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, 1 ed.(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 132.

<sup>7</sup> Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, 3 Ed.(Jakarta: Kencana, 2016), hal. 352.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 355.

Perkembangan pendidikan Islam di Tulungagung tercermin dari kemajuan yang dialami oleh madrasah-madrasah baik madrasah negeri maupun swasta di Tulungagung, salah satunya ialah Madrasah Tsanawiyah(MTs) Sunan Kalijogo Rejosari Tulungagung yang menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang mengikuti dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. MTs Sunan Kalijogo berdiri pada 18 Juli 1983 di Dusun Tekik, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Madrasah ini telah mengalami berbagai transformasi yaitu dalam sistem pengelolaan dan fasilitas pendukungnya. MTs Sunan Kalijogo terletak di daerah pegunungan di Kecamatan Kalidawir bagian selatan dan pendidikan masih tertinggal dibandingkan dengan desa-desa di bagian utara Kecamatan Kalidawir yang sudah memiliki beberapa sekolah tingkat menengah pertama. Kondisi tersebut membuat tokoh-tokoh setempat menyadari pentingnya mendirikan sebuah madrasah menengah untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Munculnya gagasan perintisan sekolah menengah ini juga dikarenakan mayoritas siswa yang lulus sekolah tingkat dasar tidak berlanjut ke jenjang selanjutnya, mobilitas ke sekolah menengah pertama yang sudah berdiri membutuhkan waktu yang lebih, dan belum ada sekolah menengah pertama di daerah pegunungan Kecamatan Kalidawir dengan

---

<sup>9</sup> Mahroji, "Wawancara pribadi," 17 September 2024.

fokus yang lebih pada ajaran Islam.<sup>10</sup> Pada masa awal berdirinya MTs Sunan Kalijogo yang bertepatan dengan era Orde Baru, madrasah ini belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah.<sup>11</sup> Menurut Mahroji, memasuki era Reformasi membawa perubahan positif bagi MTs Sunan Kalijogo, terutama dalam hal dukungan dari pemerintah. Salah satu dampak yang dirasakan adalah turunnya Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) serta bantuan pembangunan gedung pada tahun 2002.

MTs Sunan Kalijogo dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan lembaga pendidikan Islam yang didirikan atas inisiatif masyarakat di wilayah pegunungan dengan latar sosial yang beragam. MTs Sunan Kalijogo mencerminkan bagaimana lembaga pendidikan Islam di daerah mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan kebijakan nasional. Keterlibatan masyarakat dalam proses pendirian dan pengelolaan madrasah ini menjadikannya relevan untuk dikaji, karena mencerminkan peran nyata masyarakat dalam membangun dan mempertahankan sistem pendidikan Islam di tingkat lokal.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik tiga rumusan masalah yaitu:

*Pertama*, bagaimana sejarah berdirinya Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo? Fokusnya adalah membahas latar belakang sosial, ekonomi, dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

geografis masyarakat setempat yang mendorong perlunya pendirian lembaga pendidikan Islam dan dijelaskan proses pendiriannya yang melibatkan tokoh masyarakat melalui musyawarah bersama serta dukungan swadaya dari warga sekitar.

*Kedua*, bagaimana perkembangan Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo pada era Orde Baru(1983-1998)? Fokus pembahasan diarahkan pada awal perintisan, adaptasi madrasah terhadap kebijakan pendidikan Islam pada era pemerintahan Orde Baru, yang mencakup penyesuaian terhadap kurikulum, pengembangan sarana dan prasarana, serta kontribusi sosial madrasah di tengah masyarakat.

*Ketiga*, bagaimana perkembangan Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo pada era reformasi(1998-2004)? Fokus pembahasan diarahkan pada proses adaptasi madrasah dengan perubahan kebijakan pendidikan Islam khususnya madrasah pada era Reformasi yang ditandai dengan keterbukaan dan desentralisasi, penyesuaian kurikulum, pengembangan sarana dan prasarana dan peran sosial madrasah ditengah masyarakat.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, mengetahui latar belakang dan proses pendirian Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo termasuk faktor sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat serta peran tokoh masyarakat dalam mewujudkan madrasah melalui musyawarah dan swadaya warga.

*Kedua*, untuk mengetahui perkembangan Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo pada era Orde Baru mulai tahun 1983-1998, dimulai dengan

mengkaji awal perintisan madrasah yang bertepatan dengan masa Orde Baru, kemudian perkembangan kelembagaan termasuk bagaimana struktur organisasi dan manajemen madrasah beradaptasi dengan kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti kurikulum yang diterapkan. Pengembangan sarana dan prasarana yang dilakukan selama kurun waktu 1983 hingga 1998 serta mengkaji peranan Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo terhadap masyarakat di sekitarnya.

*Ketiga*, untuk mengetahui perkembangan Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo pada era Reformasi mulai tahun 1998-2004. Penelitian ini menyoroti perubahan kebijakan pendidikan Islam, khususnya yang berkaitan dengan madrasah selama era Reformasi mulai tahun 1998 hingga 2004, seperti kurikulum yang diterapkan serta pengembangan sarana dan prasarana dan peranan MTs Sunan Kalijogo dalam masyarakat juga menjadi fokus penelitian.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini merekonstruksi perkembangan MTs Sunan Kalijogo pada masa transisi politik dengan menyoroti perubahan yang terjadi dalam pendidikan Islam, khususnya madrasah. Metode sejarah digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini yang memiliki empat tahapan dan proses, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.<sup>12</sup>

*Pertama*, tahap *heuristik*(pengambilan data dan sumber). Pada tahap ini data atau sumber sejarah dikumpulkan dengan menyesuaikan pada jenis

---

<sup>12</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hal. 69.

penulisan sejarah yang akan disusun. Sumber menurut bahannya ada sumber tertulis (dokumen, prasasti, dan surat kabar) dan sumber tidak tertulis atau bisa disebut juga sumber lisan seperti wawancara.<sup>13</sup> Sumber dan data yang telah didapatkan dari MTs Sunan Kalijogo adalah piagam madrasah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1985, buku induk siswa tahun 1991-2004, susunan panitia, pengurus dan daftar pengajar dari tahun 1983-2004 dan koleksi foto sturuktur organisasi pada tahun 1983. Selain dengan mengunjungi madrasah sumber didapat dari wawancara terhadap pelaku sejarah yaitu Mahroji, Ali Fathoni, dan Hadi Supeno(pendiri MTs Sunan Kalijogo), Kayani(murid pertama tahun 1983), Hadi Sutrisno dan Widayantin(alumni angkatan 1989), Usmiatun Mukayanah(alumni angkatan 1999), Siti Mutmainah(alumni angkatan 2003), Suprapti(Tata Usaha(TU) mulai tahun 1997), Sri Wahyuni(Masyarakat sekitar madrasah) dan sumber literatur pendukung berupa buku maupun jurnal yang mengulas perkembangan pendidikan Islam serta kebijakan pemerintah terhadapnya sejak masa Orde Baru hingga Reformasi.

*Kedua, verifikasi* atau kritik sumber. Proses ini dilakukan untuk memperoleh kebenaran dan kesahihan sumber yang telah didapat,<sup>14</sup> dan tujuan dilakukanya kritik sumber adalah supaya penulis tidak menerima mentah-mentah hasil pengumpulan sumber-sumber informasi. Dalam kritik

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 73.

<sup>14</sup> Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, Penerbit Ombak(Yogyakarta, 2011), hal. 105.

sumber terdapat dua teknik yaitu *pertama*, *Autentisitas*(keaslian sumber atau disebut dengan kritik ekstern). Kritik ekstern merupakan pengujian dari segi fisik dari sumber yang telah ditemukan.<sup>15</sup> *Kedua*, *Kredibilitas*(kesahihan sumber atau disebut dengan kritik intern), kritik intern ini merupakan penilaian terhadap kebenaran isi dari sumber dan data yang telah diperoleh.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan terhadap sumber primer seperti dokumen arsip madrasah, catatan kepengurusan, serta hasil wawancara dengan para tokoh pendiri, guru, dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan perkembangan MTs Sunan Kalijogo Rejosari Tulungagung serta sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian terdahulu juga diverifikasi untuk memastikan relevansi dan kesesuaiannya dengan konteks sejarah yang diteliti.

*Ketiga*, *intrepretasi* atau penafsiran juga bisa disebut dengan analisis sejarah. Interpretasi mencakup dua tahapan yaitu tahap analisis dan tahap sintesis. Secara terminologi analisis memiliki arti menguraikan dan sintesis sendiri berarti menyatukan. Data yang telah diperoleh masing-masing akan memiliki kemungkinan yang akan diuraikan dengan metode analisis sejarah ini, setelah menemukan kemungkinan dari data yang telah diperoleh akan menghasilkan satu hasil atau fakta sejarah dengan cara sintesis yaitu menyatukan. Pada tahap ini di perlukan sisi kejujuran dari para peneliti dimana penulisan ini didasarkan dengan fakta yang ada karena pada tahapan

---

<sup>15</sup> Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hal. 77.

<sup>16</sup> Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, Penerbit Ombak(Yogyakarta, 2011), hal. 107-109.

interpretasi ini berkaitan dengan imajinasi penulis, tahap ini adalah awal dari subyektivitas penulisan sejarah.<sup>17</sup> Tahap interpretasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data yang telah diverifikasi untuk memahami perkembangan MTs Sunan Kalijogo antara tahun 1983-2004.

*Keempat*, historiografi merupakan tahap akhir yang mencakup penulisan dan pelaporan hasil penelitian secara runtut, mulai dari perencanaan hingga penarikan kesimpulan.<sup>18</sup> Pada tahap ini, penulis menyajikan gambaran hasil penelitian dari awal berdirinya MTs Sunan Kalijogo hingga perkembangannya yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terhadap pendidikan selama periode Orde Baru hingga Reformasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan uraian secara runtut dan menyeluruh.

Batasan dari penelitian ini secara temporal adalah 1983-2004, pemilihan batasan awal tahun 1983 karena menjadi awal dari berdirinya MTs Sunan Kalijogo dan batasan akhirnya tahun 2004 yang menandai periode stabilisasi kelembagaan yang ditandai dengan mulai tertatanya manajemen, peningkatan jumlah peserta didik, serta perkembangan sarana prasarana. Batasan spasial dalam penelitian ini adalah lokasi pendirian MTs Sunan Kalijogo yaitu di Dusun Tekik, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>17</sup> Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hal. 78-80.

<sup>18</sup> Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, Penerbit Ombak (Yogyakarta, 2011), hal. 113-144.